

BAB I

PEDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Para Ekonom Dalam Arsyad (1999), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP/GNP tanpa harus melihat apakah ada perubahan dalam struktur ekonomi itu atau tidak, atau kenaikan GDP/GNP itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk. Karena se-yogyanya pertumbuhan ekonomi hanya melihat kenaikan dari pendapatan nasional yang dalam hal ini adalah GDP atau PDB. Dalam N. Gregory Mankiw (2000: 7) Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi didalam batas wilayah suatu negara (domestik) selama satu tahun. Dalam perhitungan GDP ini, termasuk juga hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan atau orang asing yang bekerja atau beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan.

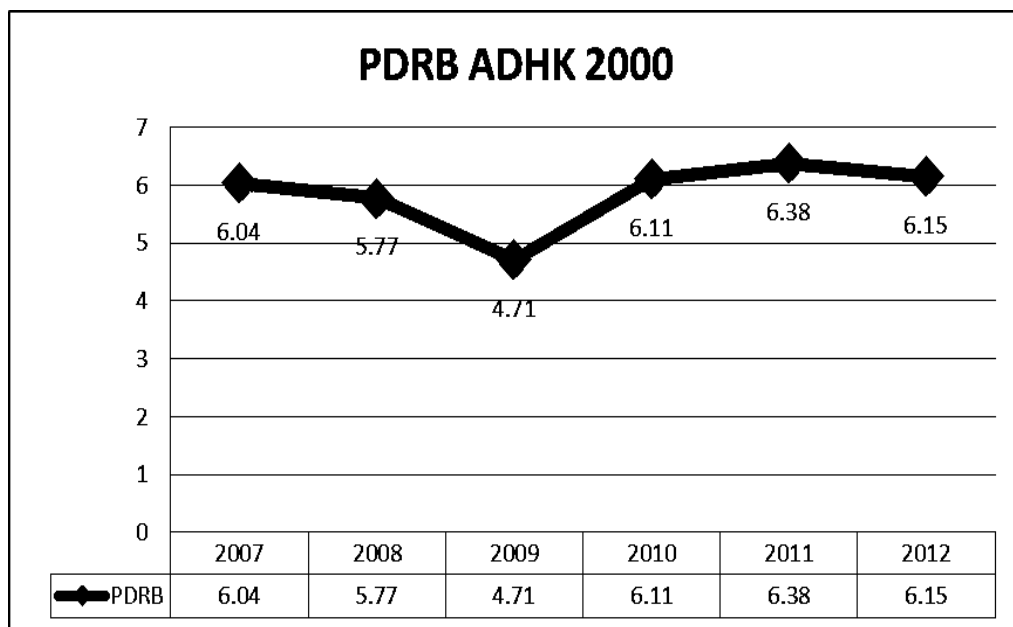
Pada negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, pembangunan ekonomi tidak lagi hanya menjadi agenda penting pemerintah pusat atau nasional saja tetapi sudah menjadi agenda wajib bagi setiap daerah yang ada di Indonesia. Setiap daerah dituntut untuk bisa memanfaatkan peluang sekecil mungkin untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah

dengan memanfaatkan berbagai pendapatan yang dihasilkan baik dari kekayaan alam daerah itu sendiri maupun dari penerimaan pendapatan lainnya (Dhyatmika, K. Wahyu, 2013: 4). Hal itu selaras dengan di keluarkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Selain itu juga undang-undang tersebut membuat pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas lagi untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan dari pemerintah pusat (Handra dan Maryati, 2009).

Sebagai provinsi yang memiliki letak strategis dan berfungsi sebagai “*bridging province*” antara provinsi-provinsi di Jawa dan Sumatera, wilayah Provinsi Banten jelas memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam membantu proses pembangunan dan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Posisi yang strategis itu juga seharusnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Provinsi Banten dalam membangun dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang ada di Provinsi Banten dengan memanfaatkan pendapatan daerah yang tinggi yang dihasilkan baik dari kekayaan alam, retribusi daerah, pajak dan sebagainya. Apa lagi Provinsi Banten ditopang oleh salah satu bandara terbesar di Indonesia yakni bandara Soekarno-Hatta, dan juga pelabuhan

tersibuk di Indonesia, yakni pelabuhan Merak Banten. Selain itu juga Provinsi Banten merupakan wilayah tujuan utama yang sangat strategis untuk properti, industri dan juga untuk para investor baik dalam negeri maupun asing. Hal itu tidak terlepas dari letak wilayah Provinsi Banten yang berbatasan langsung dengan Ibukota DKI Jakarta dan Juga Provinsi Jawa Barat.

Gambar 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten
Tahun 2007-2012



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Banten

Pada Gambar 1.1 diatas, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten yang diukur dengan PDRB ADHK mengalami fluktuasi. Pada tahun 2007-2009 pertumbuhan ekonomi cenderung menurun dan melambat. Hal ini tidak terlepas dari dampak krisis keuangan global yang terjadi di Amerika

Serikat yang secara tidak langsung berimbas pada perekonomian dunia dan perekonomian Indonesia termasuk Provinsi Banten. Kemudian pada tahun 2010-2011 ketika perekonomian dunia kembali membaik yang diikuti oleh perekonomian nasional, Perekonomian Banten kembali mengalami peningkatan sebesar 1,67 persen dari tahun 2009. Dimana pada tahun 2010 dan 2011 PDRB ADHK Provinsi Banten sebesar 6,11 persen dan 6,38 persen. Namun pada tahun 2012 perekonomian Provinsi Banten kembali mengalami penurunan sebesar 0,23 persen dari tahun sebelumnya yakni hanya mencapai 6,15 persen. Perlambatan itu terjadi kembali dikarenakan situasi keuangan global yang kembali terguncang karena krisis utang yang dialami negara-negara Eropa. Sehingga perekonomian dunia kembali bergejolak dan berdampak langsung terhadap perekonomian nasional (Badan Pusat Statistik Banten, 2013).

Seperti yang telah kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten sangat ditopang oleh sektor ekspor industri pengolahan. Pada tahun 2010 PDRB ADHB menurut lapangan usaha, sektor industri pengolahan berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi Banten sebesar 43 persen atau mencapai 63 triliun rupiah dari total PDRB Banten yang sebesar 148,9 triliun rupiah. Menurut Budiharto Setyawan selaku kepala kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten dalam Bisnis.com mengatakan, akibat dari ketergantungan pertumbuhan ekonomi Banten terhadap sektor Industri/swasta ketimbang program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah,

membuat fundamental perekonomian cenderung rapuh ketika aktivitas industri yang notabene komoditas ekspor mengalami penurunan dan perlambatan. Ketika ekonomi global lemah, pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten juga ikut lemah. Hal itu di akibatkan karena tidak adanya sektor lain yang bisa menjaga keseimbangan perekonomian Banten.

Provinsi Banten mempunyai peluang pertumbuhan ekonomi yang sangat besar karena posisi geografis dan aset pemerintah daerahnya yang sangat mendukung. Provinsi ini memiliki 56 pulau yang bisa saja keindahannya dimanfaatkan untuk menarik wisatawan lokal maupun manca negara. Salah satu pulau yang sedang menjadi perhatian dunia saat ini adalah pulau sawarna yang letaknya di Kabupaten Lebak. Pulau ini jelas menjadi bukti bahwa tempat pariwisata yang ada di Indonesia khususnya Provinsi Banten tidak kalah menarik dengan tempat pariwisata yang ada diluar negeri. Perekonomian Provinsi Banten akan semakin melambung apabila pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) sudah direalisasikan. Jembatan yang direncanakan akan segera dibangun ini akan menjadi penghubung perekonomian Jawa dan Sumatera. Selain itu juga dalam kurun waktu dekat ini Provinsi Banten akan memiliki pelabuhan laut baru di Bojonegara. Pelabuhan yang tengah dalam proses pembangunan ini akan dijadikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yang akan melayani jalur bisnis regional dan internasional lewat jalur selat sunda. Selat sunda sendiri merupakan salah satu jalur internasional yang

sangat potensial, selat ini tidak saja dilalui oleh kapal-kapal lokal, tetapi juga kapal-kapal tanker yang menghubungkan Australia dan Selandia Baru dengan kawasan Asia Tenggara (Badan Pusat Statistik Banten, 2013).

Namun menurut pandangan Ahmad Juwaini (2012) selaku staf pengajar STIE Al-khairiyah Cilegon dan peneliti pada masyarakat pemerhati kemiskinan dan pembangunan. Dalam angka pertumbuhan ekonomi sebesar 6,15 persen di Provinsi Banten masih terdapat beberapa permasalahan ekonomi yang mendera Provinsi Banten. Permasalahan tersebut tentu saja menjadi penghambat kemajuan Banten dalam mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dan permasalahan ekonomi yang masih mendera Provinsi Banten adalah: rendahnya kreasi penciptaan sumber pendapatan baru, masih banyaknya hambatan infrastruktur dan sarana pendorong laju ekonomi terutama kerusakan jalan dan fasilitas umum, angka kemiskinan yang masih cukup tinggi yaitu 652.798 jiwa (5,85% dari keseluruhan penduduk pada maret 2012), angka pengangguran yang masih tinggi yaitu 579.677 orang (10,74% dari total angkatan kerja pada february 2012), besarnya ketimpangan kesejahteraan antar wilayah (terutama ketimpangan wilayah utara dan selatan) dan juga minimnya komoditas ekspor berbasis potensi lokal. Menurutnya jika semua permasalahan tersebut menjadi prioritas utama pembangunan Provinsi Banten dan dilakukan dengan penuh kesungguhan, serempak dan dilakukan secara berkesinambungan

bukan tidak mungkin akan mampu memberikan sumbangsih yang lebih nyata lagi dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi Banten secara signifikan.

Jika Pembangunan ekonomi terus dilakukan secara berkelanjutan dan terus mengalami peningkatan dengan memanfaatkan berbagai keunggulan yang dimilikinya bukan tidak mungkin juga akan sejalan dengan peningkatan pendapatan daerah yang akan diterima oleh Provinsi Banten. Karena untuk saat ini saja penerimaan atau pendapatan daerah yang dihasilkan pemerintah Provinsi Banten begitu sangat besar dan jelas tidak boleh dipandang sebelah mata. Berikut komposisi APBD Provinsi Banten tahun 2010-2012:

Tabel 1.1
Data Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Banten
tahun 2010-2012 (jutaan rupiah)

| No | APBD | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Jumlah Penerimaan Daerah | 3,139,451 | 3,755,614 | 5,413,710 |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 2,321,749 | 2,895,570 | 3,395,880 |
| 1.2 | Pendapatan Transfer | 813,207 | 854,386 | 2,013,530 |
| 1.3 | Pendapatan Lain-lain Sah | 4,496 | 5,659 | 4,289 |
| 2. | Jumlah Belanja Daerah | 2,097,801 | 2,885,149 | 4,140,080 |
| 2.1 | Pengeluaran Rutin | 1,267,119 | 2,167,674 | 3,221,630 |
| 2.2 | Pengeluaran Pembangunan | 826,563 | 717,409 | 917,699 |

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan RI

Realisasi APBD Provinsi Banten dalam kurun waktu tiga tahun terakhir selalu mengalami peningkatan positif. Pada tahun 2010 realisasi jumlah

penerimaan atau pendapatan yang diperoleh Provinsi Banten sebesar 3,13 triliun rupiah yang dihasilkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 2,32 triliun rupiah, Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) sebesar 813,2 miliar rupiah, dan juga dari Pendapatan Lain-lain yang Sah sebesar 4,50 miliar rupiah. Sementara untuk jumlah realisasi belanja daerah pada tahun 2010 sebesar 2,09 triliun rupiah yang terdiri dari Pengeluaran Rutin (Belanja Tidak Langsung) sebesar 1,26 triliun rupiah dan pengeluaran pembangunan (Belanja Langsung) sebesar 826,5 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2012 jumlah realisasi pendapatan daerah naik signifikan sebesar 2,27 triliun rupiah dari tahun 2010 menjadi 5,41 triliun rupiah, begitu juga dengan jumlah realisasi belanja daerah yang naik signifikan sebesar 2,04 triliun rupiah dari tahun 2010 menjadi 4,14 triliun rupiah pada tahun 2012.

Untuk mewujudkan pembangunan dan peningkatan sistem perekonomian suatu daerah harus dibarengi dengan sikap serius dari pemerintah daerah dalam setiap pengambilan kebijakan, baik itu kebijakan yang bersifat fiskal maupun kebijakan moneter. Sehingga setiap dari kebijakan tersebut manfaatnya bisa tertuju langsung dengan tepat dan efisien sebagai mestinya. Dalam setiap perekonomian pemerintah juga perlu melakukan berbagai jenis kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran-pengeluaran untuk membiayai berbagai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki segala infrastruktur untuk kemudahan jalannya pemerintahan daerah itu sendiri (Sukirno, 2004).

Termasuk kebijakan dalam meningkatkan realisasi anggaran belanja yang proporsional, baik belanja yang bersifat rutin (belanja tidak langsung) maupun belanja yang bersifat pembangunan (belanja langsung). Yang dimaksud dengan realisasi belanja yang proporsional adalah anggaran belanja yang tidak boleh kecil tapi tidak harus boros juga. Karena jika anggaran belanja tersebut kecil akan merugikan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi daerah, begitu juga dengan anggaran yang terlalu besar atau boros yang hanya akan menghambat pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten. Karena dengan anggaran belanja yang proporsional akan membantu pembangunan suatu daerah berjalan lebih cepat dan perekonomian daerah tersebut juga akan berjalan dengan lancar.

Sejalan dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 22 dan 25 tahun 1999 yang mengatur mengenai otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pengelolaan pemerintah daerah baik itu ditingkatan provinsi maupun ditingkatan kabupaten dan kota kini telah memasuki masa era baru dan dimana dalam perkembangannya kebijakan ini telah diperbaharui dengan dikeluarkannya undang-undang No.32 tahun 2004 dan undang-undang No.33 tahun 2004. Kedua undang-undang ini bertujuan langsung untuk mengatur mengenai pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dengan dikeluarkannya kebijakan undang-undang tersebut akan menjadikan tantangan dan peluang tersendiri bagi seluruh pemerintahan yang ada di daerah (pemda) karena dengan adanya undang-

undang nomor 32 dan nomor 33 tahun 2004 ini pemda telah memiliki kewenangan lebih besar untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat (Fathony A. Dicka, 2011: 1).

Kemudian jika ditinjau dari tujuan utama negara Indonesia yang tertuang dalam undang-undang dasar 1945 alenia 4 yang intinya adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa, dan dari salah satu wewenang yang terdapat dari undang-undang tersebut terutama dalam GBHN 1999-2004 adalah mengenai pengelolaan keuangan daerah. Disini yang dimaksud mengenai pengelolaan keuangan daerah adalah semua unsur keuangan atau kekayaan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pengalokasiannya harus didasarkan untuk pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia sendiri sesuai dengan tujuan utama dari negara Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945 (Nurlan, Darise: 2008). Maka karena itu sangat miris apabila kita masih melihat berbagai permasalahan yang ada di Provinsi Banten, seperti tingkat kemiskinan yang masih tinggi, pengangguran yang masih tinggi dan laju pembangunan ekonomi di Banten yang masih melambat. Padahal jika dilihat dari jumlah APBD Provinsi Banten yang telah

dipaparkan sebelumnya memiliki potensi penerimaan anggaran dana yang sangat besar.

Maka dari itu peneliti ingin mengetahui sekaligus mengupas lebih dalam mengenai penggunaan dan penyaluran dana APBD Provinsi Banten yang sangat besar. Apakah penyaluran APBD itu sudah tepat dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten atau justru malah sebaliknya, yakni penggunaan APBD tersebut masih bersifat asal-asalan dan tidak tersentuh langsung manfaatnya oleh masyarakat Provinsi Banten. Karena jika permasalahan ini terus berlanjut dalam jangka waktu yang panjang, bukan tidak mungkin akan sangat berdampak buruk untuk pembangunan dan kelancaran perekonomian daerah Banten dan juga masyarakatnya yang akan semakin tertinggal dengan daerah-daerah yang ada di provinsi lain, khususnya provinsi yang berada di Pulau Jawa. Karena jika melihat dari segi potensi penerimaan pendapatan daerah dan masyarakat Provinsi Banten sebenarnya masih jauh lebih besar dari pada daerah-daerah lain, karena Banten sendiri memiliki potensi sumber daya alam atau kekayaan alam yang sangat melimpah, yang seharusnya bisa saja dimanfaatkan untuk pembangunan dan membantu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan cepat untuk kesejahteraan masyarakat Banten. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis sangat tertarik untuk membuat penelitian ini dengan judul “Analisis Pengaruh APBD Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Banten”.

1.2 Rumusan Masalah

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu alat ukur untuk melihat implementasi dari kebijakan dan operasionalisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan suatu daerah dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang optimal serta upaya dalam mendorong pembangunan ekonomi di daerah. Besarnya realisasi anggaran dan jenis belanjanya mengindikasikan besarnya komitmen dan keseriusan suatu pemerintah daerah dalam membangun aspek-aspek yang menjadi prioritas daerah (Mardiasmo, 2005:61),.

Dengan adanya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang cukup besar, karena letak strategis dari Provinsi Banten yang merupakan daerah industri, properti, wisata, dan juga memiliki salah satu Bandara dan Pelabuhan terbesar di Indonesia, maka sangatlah aneh apabila kita masih melihat berbagai permasalahan klasik yang ada di Provinsi Banten seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, carut marutnya infrastruktur jalan maupun jembatan penghubung perekonomian masyarakat. Yang sebenarnya apabila di tinjau dari jumlah realisasi PAD Provinsi Banten pada tiap tahun saja selalu mengalami peningkatan dan mencapai hasil yang memuaskan. Jadi seharusnya Pemerintah Provinsi Banten sudah bisa menggunakan atau mengoptimalkan pendapatan itu untuk berbagai kebijakan pembelanjaan yang bisa membantu mendorong laju

pembangunan perekonomian daerah yang nantinya akan membantu mensejahterakan kehidupan masyarakatnya.

Berdasarkan permasalahan dan gambaran di atas maka masalah skripsi yang akan diteliti dapat di rumuskan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di setiap daerah Provinsi Banten?
- b. Bagaimanakah pengaruh Pendapatan Transfer terhadap pertumbuhan ekonomi di setiap daerah Provinsi Banten?
- c. Bagaimanakah pengaruh Belanja Tidak Langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di setiap daerah Provinsi Banten?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari realita atau fakta yang ada dan dari hasil statistik menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat di Provinsi Banten masih jauh dari kata harapan dan kesejahteraan. Meskipun Provinsi Banten memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang sangat besar, dan memiliki potensi penerimaan dana dari sumber daya alam yang sangat melimpah, tapi faktanya kekayaan tersebut sama sekali belum memberikan pengaruh yang berarti terhadap kesejahteraan masyarakat Banten. Mengacu dari berbagai permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengkaji ulang sekaligus mengetahui ada atau tidaknya pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di tiap daerah Provinsi Banten.
- b. Untuk mengkaji ulang sekaligus mengetahui ada atau tidaknya pengaruh pendapatan transfer terhadap pertumbuhan ekonomi di tiap daerah Provinsi Banten.
- c. Untuk mengkaji ulang sekaligus mengetahui ada atau tidaknya pengaruh belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di tiap daerah Provinsi Banten.

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan bisa membantu dan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Menambah masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam menyesuaikan penyusunan dan pengalokasian anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) untuk pembangunan daerah Provinsi Banten dan meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat yang ada di Provinsi Banten.
2. Memberikan sumbangan informasi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian serupa mengenai permasalahan dalam penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).
3. Sebagai bahan dan tambahan ilmu yang dapat memperkaya pengetahuan dan sarana untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh

dibangku kuliah, serta sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan strata 1 pada fakultas Ilmu Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.